**Kerangka Dasar Pembentukan Kebijakan UKM Indonesia :**

**Sebuah Pemikiran Strategis**

**Hafiz Rahman[[1]](#footnote-2)**

**Abstract**

One of the important elements in developing and empowering Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) is the existence/availability of government policies, which are aimed to increase competitiveness of SMEs. A good development policy is considered as a policy which is focused on the real situation and condition that should be faced by SMEs themselves as well as the needs of SMEs. There are many policies that can be created and developed. Anyhow, we should consider which policy that should be uses in order to develop and empower SMEs. There are three main level of policies that can be chosen, micro level policies, macro level policies and meso level policies. Other element that should be considered in developing and empowering SMEs is a triangle interdepartmental relationship between university-government and industry. In this case, a Triple-Helix Model developed by Leydesdorff and Etzkowitz will be used to support an argument that there should be an active, dynamics and sustainable relationship between those three actors in developing and empowering SMEs. This paper puts its emphasis to expose micro-macro-meso level policies for SMEs and the use of Triple-Helix Model to explain about triangle interdepartmental relationship between actors in developing and empowering SMEs.

**PENDAHULUAN**

Adalah sesuatu yang tidak terbantahkan lagi jika dinyatakan bahwa UKM (Usaha Kecil dan Menengah) memiliki dan membawa dampak serta kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Tidaklah berlebihan jika kemudian UKM dikatakan sebagai salah satu pondasi ekonomi terkuat Indonesia, sebagaimana yang terlihat dari fakta yang terjadi pada saat Indonesia diterpa krisis moneter dan ekonomi berkepanjangan pada 1998-2002 dan hingga saat ini UKM tetap memberikan kontribusi positif pada indikator ekonomi makro Indonesia (produk domestik bruto/PDB, kesempatan kerja, penekan laju inflasi, sumber inovasi dan kontribusi terhadap kinerja ekspor) (Acs, 1999 dan Urata, 2002). Dengan kondisi, tersebut cukup wajar kiranya jika perhatian dan keberpihakan serius perlu diberikan terhadap setiap kebijakan dan program perkuatan dan pengembangan UKM Indonesia sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam perkuatan dan pengembangan UKM Indonesia. Namun demikian, tidak hanya pemerintah yang dituntut untuk serius dalam memperhatikan masalah UKM namun juga semua pihak yang terlibat sebagai stakeholders UKM itu sendiri.

Jika dibandingkan dengan kondisi kebijakan dan program perkuatan dan pengembangan UKM yang dilakukan negara-negara berkembang lain seperti di Afrika dan Amerika Latin, bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan dan ditetapkan pemerintah Indonesia telah sejajar dengan negara-negara tersebut dan bahkan dibanding beberapa negara dapat dikatakan selangkah lebih maju. Namun tentunya hal ini tidaklah menjadi sebuah alasan untuk berpuas diri dan merasa menjadi yang terbaik. Apalagi jika mengingat bahwa mau tidak mau kita harus secepatnya mempersiapkan UKM kita agar dapat berperan aktif dalam menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi yang sudah datang saat ini. Ini adalah tantangan terbesar, tidak hanya untuk UKM Indonesia, tapi juga seluruh stakeholders-nya. Harus ada kajian-kajian mendalam dari setiap produk kebijakan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah secara kontinyu agar produk-produk kebijakan dan peraturan tersebut dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi UKM Indonesia. Disinilah dituntut peran aktif dari akademisi, ilmuwan, peneliti dan para ahli UKM di universitas, lembaga riset maupun di institusi lainnya untuk turut memberikan sumbang saran, kajian dan pikiran secara kritis dan tajam.

Paper ini dibuat atas dasar pemikiran bahwa diperlukan keterlibatan aktif akademisi di perguruan tinggi dalam memberi kajian dan tinjauan atas kebijakan UKM Indonesia yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga pada akhirnya diharapkan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah dapat tepat guna/efektif untuk memperkuat eksistensi UKM Indonesia dalam perekonomian. Kajian dalam paper lebih diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk mengidentifikasi dasar-dasar penetapan kebijakan UKM Indonesia serta kebijakan apa saja yang relevan, sesuai dengan hasil identifikasi tersebut.

**Framework 1**

Kita bersama tentunya telah mengetahui begitu banyak produk kebijakan yang menyangkut UKM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik di pusat maupun didaerah. Namun pertanyaan terbesar yang timbul dari sekian banyak produk kebijakan itu adalah: *apakah telah dilakukan identifikasi dan telah ditetapkan sebuah kerangka berpikir yang jelas tentang apa yang menjadi prioritas/fokus pengembangan dan perkuatan UKM Indonesia*? Lalu lebih jauh, *apakah semua kebijakan yang ditetapkan telah ditetapkan sesuai dengan kerangka berpikir tersebut?* Untuk menjawab kedua pertanyaan penting tersebut, ada baiknya jika kita kembali berupaya untuk membahas kerangka berpikir utama yang biasanya dilakukan dalam membuat kebijakan UKM.

 Kerangka utama dalam upaya menetapkan kebijakan pengembangan dan perkuatan UKM dapat dimulai dari upaya untuk mengidentifikasi pola dasar dalam pengembangan UKM, dalam bentuk tingkatan dalam kebijakan UKM yang akan berpengaruh terhadap proses operasinya sehari hari, yaitu *kebijakan pada* *tingkatan mikro (micro level policies), tingkatan makro (macro level policies)* dan *tingkatan meso (meso level policies).* Identifikasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketiga pola dasar kebijakan pengembangan UKM tersebut amat diperlukan untuk mengetahui apa saja prioritas/fokus kebijakan pengembangan UKM yang dapat ditetapkan. Hal ini tentunya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan fakta serta kondisi riil yang terjadi pada UKM Indonesia.

Sebagai ilustrasi, pola dasar pengembangan UKM tersebut diperlihatkan pada diagram berikut:

*Micro level* disini dimaksudkan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan UKM tersebut secara internal, seperti proses operasinya sehari-hari. Pada tingkatan mikro, analisis dan kajian lebih diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk mengidentifikasi kondisi internal UKM secara detil dan mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi, untuk selanjutnya dilakukan upaya perbaikan dan up-grading. Dengan demikian pilihan kebijakan UKM yang diarahkan pada micro level hendaknya dilakukan dengan tujuan dan dalam bentuk peningkatan *firm level competitiveness* UKM serta *peningkatan kapasitas internal* UKM. Kebijakan-kebijakan dan program pengembangan serta perkuatan kapasitas internal UKM merupakan bentuk utama dari pilihan kebijakan pada micro level ini. Beberapa kebijakan dan program dapat dikembangkan, antara lain:

1. Up-grading aspek teknis dan manajemen UKM
2. Penyetaraan business plan
3. Standardisasi laporan keuangan
4. Training, workshop dan bentuk pelatihan lain yang berkaitan dengan operasional UKM
5. Pemantapan status, badan hukum dan aspek legalitas operasional UKM
6. Up-grading sistem operasi, inovasi dan produksi
7. dll

Pada tingkatan makro (*macro level*), analisis dan kajian dalam kebijakan pengembangan UKM diarahkan pada upaya untuk menstimulasi berdirinya institusi-institusi pendukung UKM maupun berbagai pola/kebijakan sebagai upaya untuk memberdayakan serta memaksimalkan peran institusi tersebut dalam pengembangan UKM. Institusi dimaksud disini adalah lembaga baik milik pemerintah maupun swasta yang bertujuan sebagai *business support institutions* bagi UKM. Business support dapat diberikan dan dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti produksi, pengendalian limbah produksi, akses pasar, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, trade fair, akses pada lembaga keuangan dll. Berbagai bentuk kebijakan yang dapat dilakukan berkenaan dengan penetapan kebijakan dalam *macro level* antara lain:

1. Kebijakan dalam hal pengembangan dan pemberdayaan lembaga keuangan khusus bagi UKM (microfinance, venture capital, business angels, credit guarantee company/perusahaan penjamin kredit, bank perkreditan rakyat dll).
2. Kebijakan dalam hal pengembangan dan pemberdayaan penyedia jasa layanan bisnis bagi UKM (Business Development Services/BDS providers dan Klinik Konsultasi Bisnis).
3. Kebijakan dalam hal pengembangan dan pemberdayaan institusi inkubator bisnis (Business Incubation Center/BIC).
4. Kebijakan pengembangan, pemberdayaan serta perkuatan network UKM (cluster, asosiasi bisnis dan sentra UKM).
5. Kebijakan pendirian dan pengembangan institusi pendukung akses pasar (Alternative Trade Organization/ATO)
6. dll.

Pada *meso level*, kebijakan pengembangan UKM diarahkan pada upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan persaingan yang sehat terhadap perkembangan UKM. Dalam artian lain, pada meso level, kebijakan pemerintah diharapkan dibuat dengan tujuan agar UKM dapat lebih mampu untuk turut merasakan iklim persaingan yang fair, iklim dunia usaha yang kondusif, pemberian fasilitas khusus bagi UKM serta meniadakan diskriminasi terhadap eksistensi UKM dalam perekonomian. Dalam bentuk yang lebih ekstrem, kebijakan pada meso level di beberapa negara berkembanga di dunia justru diarahkan untuk memberikan proteksi bagi UKM dan *infant industries* dalam dunia usaha dan persaingan. Bentuk kebijakan pada meso level yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pemberian keringanan suku bunga bank maupun jangka waktu pinjaman terhadap pinjaman/kredit UKM.
2. Pemberian jaminan khusus terhadap pinjaman/kredit UKM.
3. Penetapan regulasi khusus yang memudahkan UKM untuk dapat lebih cepat memasuki pasar/penetapan *no entry barriers* bagi UKM.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat
5. Pemberian tarif khusus bagi impor bahan baku, bahan bantu dan bahan penolong bagi kebutuhan UKM.
6. Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan upaya perkuatan permodalan dan keuangan UKM.
7. Kebijakan tentang Hak Cipta, Merk dan Dagang / HAKI bagi produk-produk UKM
8. Penyederhanaan regulasi perpajakan serta transparansi penghitungan pajak
9. dll

Kebijakan-kebijakan yang dapat dibuat sesuai dengan masing-masing tingkatan tersebut dapat dilihat pada piramida sebagai berikut:

* Suku bunga bank
* Jaminan pinjaman/kredit UKM
* Kebj. memasuki pasar/penetapan *no entry barriers*
* Perkuatan permodalan dan keuangan
* Hak Cipta, Merk dan Dagang / HAKI, dll
* Lembaga keuangan khusus bagi UKM
* Jasa layanan bisnis UKM
* Inkubator bisnis
* Network UKM
* Pendukung akses pasar, dll.
* Teknis - manajemen UKM
* Business plan
* Standardisasi laporan keuangan
* Training, workshop, pelatihan
* Status, badan hukum, aspek legalitas operasional, dll.

**Micro Makaan dalam b**

 **Makro**

 **Meso**

Setelah dilakukannya identifikasi terhadap bentuk-bentuk kebijakan yang dapat ditetapkan dalam berbagai tingkatan/level, maka pertanyaan penting selanjutnya yang harus dijawab adalah: *pada tingkatan/level mana fokus dan prioritas pengembangan kebijakan UKM sebaiknya diarahkan?* Untuk menjawab pertanyaan penting ini, maka sebelumnya perlu diketahui bahwa prioritas dan fokus pengembangan kebijakan UKM pada masing-masing negara berbeda satu sama lainnya, tergantung pada tingkatan/level mana yang hendak dikembangkan serta kondisi internal UKM itu sendiri. Sebagai contoh, pada kebanyakan negara-negara Eropa Barat, prioritas pengembangan kebijakan UKM-nya lebih diarahkan pada pengembangan kebijakan pada *macro level* (pendirian, pengembangan dan perkuatan institusi pendukung UKM, baik pemerintah maupun swasta). Pilihan fokus dan prioritas pengembangan kebijakan UKM pada macro level ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pada tingkatan mikro (firm level competitiveness dan kapasitas internal UKM), rata-rata UKM di negara-negara Eropa Barat telah memenuhi standar dalam manajemen usaha dan telah mempraktekan konsep-konsep manajemen secara menyeluruh (seperti telah adanya status/badan hukum yang jelas atas usaha yang dijalankan, telah adanya penerapan konsep dan prosedur manajemen keuangan, manajemen produksi dan operasi, manajemen pemasaran, telah adanya pemberlakuan hak cipta, merk dan dagang dll), yang walaupun masih dalam bentuk sederhana tetapi telah sesuai dengan prosedur dan konsep pengoperasian usaha yang berlaku secara umum. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika UKM-UKM di negara-negara Eropa Barat saat ini telah memasuki era/babak baru dalam pengembangan usahanya berupa *upaya ekspansi usaha* daam menghadapi globalisasi dan era perdagangan bebas. Proses ekspansi usaha UKM tersebut dilakukan baik dalam bentuk ekspansi domestik (peningkatan kapasitas dan volume produksi) maupun ekspansi lintas batas negara (melalui lisensi, joint venture, branch, franchise dll). Kondisi seperti itu, dengan sendirinya membuat institusi pendukung usaha (*business support institutions*) bagi UKM mutlak dibutuhkan. Dan sejalan dengan hal tersebut, maka fokus dan prioritas pengembangan kebijakan UKM mereka lebih diarahkan pada macro level.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? *Pada tingkatan/level mana fokus dan prioritas pengembangan kebijakan UKM Indonesia khususnya Sumatera Barat sebaiknya diarahkan?*

Adalah fakta dan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar UKM Indonesia dan UKM Sumatera Barat memiliki kelemahan dan keterbatasan mendasar dalam hal pengelolaan/manajemen usaha serta perkuatan kapasitas internal usahanya. Masalah pelik seperti ketiadaan status/badan hukum usaha serta legalitas operasi yang jelas, ketiadaan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar dan prosedur, ketiadaan modal untuk berproduksi dan ekspansi, ketidakmampuan berproduksi sesuai standar, kelemahan pengelolaan sumberdaya, ketidaktahuan tentang konsumen-pasar dan upaya memasuki pasar, kelemahan pengelolaan/manajemen operasional harian, dll merupakan bentuk-bentuk kelemahan internal yang paling umum dan paling banyak ditemui pada UKM Indonesia. Kondisi seperti ini telah membuat sebagian besar UKM Indonesia tetap kerdil, tanpa adanya perkembangan usaha yang secara signifikan akan mampu membawa dampak ekonomi positif terhadap pemilik dan masyarakat sekitar serta ekonomi regional-nasional.

Namun sayangnya, jika kita perhatikan kebijakan UKM yang ditetapkan pemerintah, terlihat kecenderungan ketidakjelasan titik berat dan prioritas, pada level mana pemerintah memfokuskan kebijakannya sebagai *entry point* bagi pengembangan UKM Indonesia. Jika kita simak, terdapat cukup banyak kebijakan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan dalam pengembangan UKM pada setiap tingkatan/level baik micro, macro maupun meso level. Pada dasarnya semua kebijakan itu baik, namun ketiadaan fokus dan prioritas level kebijakan telah menjadikan kebijakan-kebijakan itu tidak efektif dan tidak mencapai sasaran.

Memperhatikan fakta yang terjadi pada sebagian besar UKM Indonesia tersebut maka sudah sewajarnya jika pemerintah menitikberatkan perhatian pada upaya penetapan kebijakan yang berhubungan dengan *peningkatan kapasitas internal* serta *peningkatan firm level competitiveness UKM Indonesia* terlebih dahulu sebagai prioritas utama. Atau dalam artian, sebaiknya prioritas utama kebijakan pemerintah diarahkan pada *micro level* terlebih dahulu. Jika kebijakan ini telah tersosialisasi dengan benar dan telah ada tindak lanjut signifikan yang menghasilkan performa UKM yang lebih baik, maka prioritas selanjutnya dapat diarahkan pada *macro level* dan pada *meso level*. Hal tersebut sebagaimana yang terlihat pada piramida tingkatan kebijakan sebagaimana yang telah disampaikan terdahulu.

**Framework 2**

Kerangka utama berikutnya yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan UKM di Indonesia adalah dalam bentuk kebijakan kerjasama integral tiga pihak, yaitu antara universitas, pemerintah dan industri. Saat ini terlihat bahwa masing-masing institusi cenderung berjalan sendiri-sendiri/terpisah dalam upaya pembinaan, perkuatan dan pengembangan UKM. Sehingga terkesan tidak ada koordinasi, integrasi, komunikasi dan saling tukar informasi antara ketiga institusi tersebut. Padahal kerjasama antar ketiga pihak itu amat diperlukan dalam pengembangan UKM.

UKM dalam posisinya sebagai salah satu aktor dalam dunia usaha tentunya membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, universitas dapat diharapkan untuk menjalankan peran sebagai sumber riset dan inovasi, sumber pembinaan dan pelatihan dan sumber pengetahuan bagi peningkatan kapasitas internal UKM. Dengan kondisi seperti ini, maka universitas tentunya diharapkan dapat secara aktif membina hubungan/partnership dan network bersama UKM. Karena dengan keterbatasan kondisi yang dimilikinya, biasanya UKM cenderung melihat universitas dengan berbagai fasilitas, infrastruktur dan sumber daya manusianya sebagai sebuah ‘institusi super’ yang sulit didekati bagi keperluan usahanya. Dengan situasi seperti ini, maka tidak ada jalan lain : pihak universitas lah yang harus lebih aktif dan agresif untuk mendekat pada UKM. Selain mndekat pada UKM, universitas tentunya juga dituntut untuk mebina hubungan kerjasama/network bersama pihak pemerintah dan industri.

Pemerintah sesuai dengan posisinya, hendaknya mampu bertindak sebagai *regulator* yang bisa memihak pada kepentingan UKM. Dalam hal ini, secara spesifik pemerintah harus dapat mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan network dan kerjasama tiga pihak, pemerintah-industri-universitas, sebagai sebuah upaya perkuatan dan pengembangan UKM Indonesia.

Dilain pihak, industri dalam hal ini pihak swasta, hendaknya juga dapat berperan dalam kebijakan pengembangan UKM. Salah satunya adalah dengan cara memberikan keleluasaan bagi UKM untuk dapat bersama-sama memasuki arena bisnis. Selain itu, pihak swasta juga dituntut untuk turut menciptakan iklim persaingan/kompetisi yang fair dan dinamis, tanpa adanya diskriminasi terhadap keberadaan UKM.

Proses penciptaan kebijakan yang mengatur hubungan kerjasama antara pihak pemerintah, universitas dan industri dalam pengembangan UKM ini sesuai dengan konsep *Triple-Helix Model* yang dikembangkan oleh Leydesdorff dan Etzkowitz (1998, 2002). Didalam konsep ini, Leydesdorff dan Etzkowitz berupaya untuk menjelaskan bahwa upaya pengembangan UKM dapat dilakukan melalui sebuah penetapan kebijakan yang mengatur hubungan timbal balik antara pihak pemerintah, universitas dan industri dalam satu kesatuan yang akan menghasilkan sebuah ‘*overlaid institutional sphere’,* yang diharapkan mampu mendorong proses perkuatan dan pengembangan UKM serta inovasi dalam UKM. Untuk lebih jelasnya, konsep *Triple-Helix Model* yang dikembangkan oleh Leydesdorff dan Etzkowitz (1998, 2002) ini dapat diperlihatkan melalui diagram venn berikut:

 Pemerintah

 **Industri**

Universitas

One-to-one relations/linkages

One-to-one relations/linkages

***Overlaid institutional sphere***

One-to-one relations/linkages

Pada konsep Triple Helix Model, ketiga pihak diatas harus dapat memainkan peranan serta membina hubungan yang dinamis dan berkelanjutan antara satu dengan lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua macam ‘linkages’ yang menghubungkan masing-masing aktor, yaitu:

1. *One-to-one relations/linkages* (pemerintah-universitas, universitas-industri, industri-pemerintah). Disini dituntut adanya kebijakan dinamis dan berkelanjutan yang dapat mengatur hubungan antara masing-masing aktor yang memiliki one-to-one relations/linkages sesuai dengan perannya masing-masing dalam membina, memperkuat dan mengembangkan UKM.
2. *One-to-two relations/linkages*
3. antara pemerintah dengan universitas-industri
4. antara universitas dengan pemerintah-industri
5. antara industri dengan pemerintah-universitas.

Pada one-to-two relations/linkages terdapat sebuah area yang diidentifikasi sebagai *overlaid institutional sphere* dimana ketiga institusi tersebut dituntut untuk berperan aktif, dinamis, koordinatif dan berkelanjutan dalam membina dan mengembangkan UKM. Selain dibutuhkan kebijakan yang memperjelas dan menentukan peranan aktif-dinamis masing-masing aktor one-to-two relations/linkages dalam pembinaan UKM, maka yang tidak boleh terlupakan dan amat vital serta krusial dilakukan adalah penetapan kebijakan pada overlaid institutional sphere. Hal ini mengingat wilayah overlaid institutional sphere merupakan sebuah wilayah dimana ketiga aktor tersebut dituntut untuk dapat berbuat semaksimal dan seefektif mungkin dalam pengembangan UKM. Diharapkan dengan adanya kebijakan yang efektif pada overlaid institutional sphere, setiap program dan kegiatan pengembangan UKM dapat dilakukan secara integral dengan melibatkan ketiga pihak tersebut.

**Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan**

1. Diperlukan pengembangan kebijakan UKM yang sesuai sifatnya, harus berdasarkan pada fakta dan kondisi yang terjadi pada UKM.
2. Dalam pengembangan kebijakan UKM Indonesia, perlu ditetapkan sebuah prioritas/fokus utama tentang kebijakan pada level mana yang akan terlebih dahulu ditetapkan. Memperhatikan fakta-fakta yang terjadi pada UKM Indonesia, maka akan lebih relevan dan efektif jika pada tahap awal prioritas/fokus kebijakan lebih diarahkkan pada upaya *perkuatan kapasitas internal UKM* dan *peningkatan firm level competitiveness* UKM Indonesia atau dengan kata lain, penetapan kebijakan pada *micro level*.
3. Terdapat kecenderungan adanya koordinasi, komunikasi dan saling tukar informasi yang kurang mulus antara tiga pihak yang dituntut berperan aktif dalam pengembangan UKM (Pemerintah, Universitas, Industri). Untuk itu, diperlukan adanya sebuah kebijakan yang mampu mengakomodir peran dan hubungan masing-masing institusi tersebut dalam pembinaan dan pengembangan UKM.
4. Diperlukan kebijakan yang efektif dalam mengatur *one-to-one relations/linkages* dan *one-to-two relations/linkages* antara ketiga aktor dalam pengembangan UKM Indonesia. Selain itu, juga perlu ditetapkan kebijakan pada *overlaid institutional sphere* yang merupakan area/wilayah dimana ketiga aktor tersebut dituntut berperan aktif, dinamis dan koordinatif secara bersamaan.
5. Pengembangan kebijakan UKM perlu dilakukan secara integral, dinamis dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi UKM dalam perekonomian Indonesia.

**Referensi**

Etzkowitz, Henry, *The Triple Helix of University-Industry-Government Implications for Policy and Evaluation*, [www.sister.nu](http://www.sister.nu)., 2003.

Kappel, Robert. et.al. (Hrsg), *Klein- und Mittelunternhemen in Entwicklungslaendern: Die Herausfoerderungen der Globalisierung*, Schriften des Deutschen Uebersee Instituts Hamburg, No. 58, Hamburg, 2003.

# **Mustafa, Riad, *Policy and Firm Linkages in Indonesia*, Paper-SEPNeT International Conference, 2006.**

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Development Strategies and Support Services for SMEs: Proceedings of Four Intergovernmental Expert Meetings – Volume I dan Volume II*, United Nations, New York-Jenewa, 2000.

1. Staf Pengajar Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas [↑](#footnote-ref-2)